



PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp. (0361) 811004 – Fax. (0361) 15247
<http://pn-tabanan.go.id> – email : info@pn-tabanan.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 18 /Pid.C/2018/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara;

Nama : **I MADE PEDIA BUDHI;**
Tenpat/tgl. Lahir : Denpasar /14 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Agama : Hindu;
Alamat : Dalung;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Adrian, S.H.,.....Hakim ;
I Wayan Budhi Harsana, SH.,.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca surat Pengiriman Berkas Perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.14/III/PPNS/Sat.Pol.PP/2018 tanggal 7 Maret 2018;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan ;
- Keterangan saksi-saksi PUTU AYU RATNAWATI GIRI, SH., dan I MADE SARTIKA telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I **MADE PEDIA BUDHI**, adalah benar dan sesuai dengan berita acara Penyidik pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : I **MADE PEDIA BUDHI;**

Membaca Catatan Tindak Pidana Ringan beserta surat –surat keterangan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **I MADE PEDIA BUDHI**, keterangan saksi-saksi PUTU AYU RATNAWATI GIRI, SH., dan I MADE SARTIKA, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE PEDIA BUDHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "tidak membawa KTP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MADE PEDIA BUDHI** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 29.000, (dua puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama I Made Tedia Budhi;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018** oleh kami : **Adrian, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 07 Maret 2018, Nomor 18 /Pid.C/2018/PN Tab putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Wayan Budhi Harsana, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Wayan Budhi Harsana, SH

Adrian, S.H,

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I Made Darmajaya, S.H.
19631231 198303 1 047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)